

ABSTRAK

Collaborative governance adalah suatu arena strategis yang mempertemukan institusi publik, sektor swasta, dan masyarakat dalam suatu kerangka kerja guna menangani permasalahan publik yang bersifat kompleks termasuk kekerasan seksual. Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai proses *collaborative governance* dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak di kabupaten Langkat sekaligus melihat mengapa kasus kekerasan seksual pada anak mengalami kenaikan meski kolaborasi antar pemangku kepentingan sudah diterapkan. Grand teori yang digunakan berdasarkan pemahaman yang ditawarkan oleh ansel and gash (2008), yang meliputi, *dialogue face to face*, *trust building*, *komitmen to process*, *shared understanding*, *intermediate outcome*. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung bagaimana proses kolaborasi serta faktor-faktor penghambatnya. Adapun Small wins atau kemenangan kecil yang diperoleh dari kolaborasi, ialah; semakin banyak nya korban ataupun masyarakat yang berani melapor kasus kekerasan seksual sehingga secara database/kertas kasus tersebut mengalami peningkatan. Namun tingginya kesadaran masyarakat dalam melapor tidak disertai dengan pengetahuan mengenai prosuder pelaporan serta keberadaan lembaga lain, seperti dinas P2KB dan PPA sehingga dalam melapor kasus kekerasan seksual pada anak masyarakat lebih memilih pihak kepolisian. Selanjutnya dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat kolaborasi, yaitu pada bagian sosial-budaya seperti kurang terbuka nya keluarga dalam memberikan informasi. Kemudian *instutional*, yaitu tidak dilibatnya Lembaga swadaya seperti ASB secara struktural kelembagaan.

Kata Kunci: Collaborative, Kekerasan Seksual Anak, Kabupaten Langkat

ABSTRACT

Collaborative governance serves as a strategic arena bringing together public institutions, the private sector, and the community within a framework designed to address complex public issues, including sexual violence. This study aims to outline the collaborative governance process used to tackle child sexual violence in Langkat Regency and to examine why the incidence of such cases has risen despite the implementation of stakeholder collaboration. The study draws upon the theoretical framework proposed by Ansell and Gash (2008), encompassing face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. A qualitative, descriptive research method was employed, involving direct fieldwork to observe the collaboration process and identify the factors hindering it. "Small wins" resulting from this collaboration include an increase in the number of victims and community members willing to report sexual violence, leading to a rise in recorded cases. However, this heightened public willingness to report has not been matched by knowledge regarding reporting procedures or the existence of other relevant agencies—such as the P2KB (Population Control and Family Planning) and PPA (Women and Child Protection) offices—causing the public to prefer reporting child sexual violence cases directly to the police. Furthermore, implementation faces obstacles, particularly regarding socio-cultural factors, such as the reluctance of families to disclose information openly, and institutional factors, such as the failure to structurally integrate non-governmental organizations (NGOs) like ASB into the collaborative framework.

Keywords: *Collaborative, Child Sexual Abuse, Langkat Regency*